

Politik dalam Lingkaran Kekerabatan: Etnografi Praktik Kekuasaan di Kabupaten Humbang Hasundutan

Berkat Exsaudi Sihombing

Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Correspondence author: berkatexaudi2019@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Dalihan Natolu, General election, Identity Politics, Marga.

How to cite:

Sihombing, B.E., 2025. Praktik Politik Berbasis Kekerabatan di Kabupaten Humbang Hasundutan

ABSTRACT

Marga for the Batak people is an identity used to determine a person's status and role in society, thereby creating a sense of solidarity both socially, culturally and politically. So that the clan, as a guideline for the kinship system of the Batak tribe, becomes the basis of politics in general elections. This research is a descriptive research. The method used is qualitative, with data collection techniques using observation and in-depth interviews. The subjects in this research are legislative candidates for the 2019-2024 period in Humbang Hasundutan Regency, traditional leaders and the people of Humbang Hasundutan Regency. The results of the research show that the kinship system regulated in the Dalihan Natolu is a guide for the people of Humbang Hasundutan Regency in determining their choices. This kinship-based identity politics has consequences for society. These consequences can have positive impacts and can have negative impacts.

1. Pendahuluan

Suku Batak merupakan suku yang dikenal akan sistem kekerabatan yang kuat. Hal ini ditandai adanya *marga* sebagai identitas yang dimiliki seseorang. Sistem *marga* yang menjadi acuan dalam *martutur* (bersilsilah) bagi Suku Batak itu sendiri. *Marga* merupakan suatu kelompok dengan garis keturunan dari nenek moyang yang sama Adapun garis keturunan tersebut ditarik dari keturunan bapak, sebab dalam budaya Suku Batak menganut paham *patrilineal*. Berdasarkan fenomena tersebut, *marga* merupakan nama yang otomatis didapatkan oleh seorang anak dengan mengikuti *marga* dari ayahnya. *Marga* pada umumnya, digunakan untuk mengatur hubungan persaudaraan sebagai identitas baik untuk kalangan semarga maupun dengan orang-orang dari kalangan *marga* lain (Simanjuntak, 2016).

Marga bagi Suku Batak tentunya membentuk sebuah sistem kekerabatan yang mempengaruhi berbagai aktivitas bagi masyarakat Suku Batak. *Marga* menciptakan suasana saling menghormati, saling menjaga keharmonisan, saling menjaga satu sama lain, mempererat rasa persaudaraan melalui keterlibatan acara atau agenda penting dari setiap kerabat satu marganya (Sitompul, 2022).

Setiap *marga* selalu menekankan untuk *marsidapari*, atau *marsirumpa* (gotong royong) dengan sesama kerabatnya, sebab orang Batak percaya dengan istilah "*tampakna do tajomna, rim ni tahi do gogona*" yang berat terasa ringan, semua senang dan bersemangat dalam memberikan bantuan. Luar biasanya, *marsidapari* atau *marsirumpa* menebus kelas ekonomi. *Napogos manang namora* (Miskin atau Kaya), *nagumogo manang na gale* (yang kuat atau yang lemah) semua saling memberikan hati untuk meringankan beban kerabat satu marganya (Sitompul, 2022).

Marga bagi masyarakat Suku Batak merupakan identitas yang digunakan untuk menentukan status dan peran seseorang dalam masyarakat, sehingga melahirkan rasa solidaritas baik secara sosial, budaya, maupun politik. Menurut Keitzentein (1996) identitas merupakan sebuah pertanda yang membedakan individu/kelompok dengan individu/kelompok lainnya yang dibangun oleh individu/kelompok tersebut serta dimodifikasi secara massif dengan pihak-pihak terkait (Daulay dkk, 2019). Sedangkan Menurut Ambardi (2011) politik identitas merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik (Daulay dkk, 2019).

Marga sebagai pedoman sistem kekerabatan masyarakat Suku Batak, menjadi basis politik dalam pemilihan umum. Berdasarkan hasil penelitian Noprizal Haloho (2017) dalam tulisannya yang berjudul "Jaringan Marga sebagai Mesin Politik Pemenangan Bupati Terpilih Periode 2015-2020" menjelaskan marga sebagai mesin politik sebab orang Batak yang ada di Kabupaten Samosir memegang prinsip bahwa "*dang tumagon tu halak molo adong do na dihita*" yang berarti "untuk apa memilih orang lain jikalau masih ada yang dari dalam diri kita". Dengan adanya prinsip ini, maka sebuah kebanggaan apabila ada dari marga tertentu yang mencalonkan diri menjadi kandidat Bupati maupun kandidat calon Legislatif.

Politik identitas berbasis kerabat juga pernah terjadi dalam pemilihan Bupati kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2015. Berdasarkan data perolehan suara dari Komisi Pemilihan Umum (2015) pasangan calon no. 1 (Marganti Simanullang dan Ramses Purba) dari jalur Independent memperoleh suara 27.719 suara. Pasangan calon no. 2 (Dosmar Banjarnahor dan Saut Simamora) yang diusung oleh PDI, PKB, Gerindra, PAN dan HANURA memperoleh suara 30.311 suara. pasangan no. 3 (Rimso Sinaga dan Derince hasugian) dari jalur independent memperoleh suara 2.553 suara. Pasangan no. 4 (Palbet Siboro dan Henry Sihombing) dari partai Golkar memperoleh suara 24.396 suara. Serta pasangan no. 5 (Harry Marbun dan Momeno Sihombing) dari partai Golkar memperoleh suara sebanyak 11.262 suara.

Berdasarkan fenomena tersebut, politik membuka ruang kontestasi bagi para kandidatnya. Berdasarkan fenomena Pemilihan Bupati 2015-2020 terjadi kontestasi antara Henry Sihombing (Calon Wakil Bupati No. 4) dengan Momeno Sihombing (Calon Wakil Bupati No. 5). Terjadinya persaingan dalam mengambil suara semarganya sebagai lumbung menaikkan jumlah pendukungnya. Kondisi yang sama juga terjadi dalam pemilihan Legislatif, besarnya peluang dalam menciptakan kontestasi baik antar sesama marga maupun kontestasi antara marga yang satu dengan marga yang lainnya.

Hal ini membuat penulis tertarik mengulik dan membahas fenomena politik identitas berbasis kerabat tersebut yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian Skripsi dengan judul “Praktik Politik Berbasis Kerabat Di Kabupaten Humbang Hasundutan”

2. Metode

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi literatur. Teknik penentuan informan akan mencari informan kunci dan peneliti akan mencari informan utama. Sasaran informan yaitu Calon Legislatif Periode 2019-2024 Kabupaten Humbang Hasundutan, Tokoh adat, serta masyarakat. Teknik yang akan digunakan penulis jika tahap pengumpulan data telah selesai ialah mengumpulkan data hasil observasi, wawancara, catatan harian di lapangan, dan juga hasil studi literatur. Teknik ini digunakan karena peneliti merasa mudah untuk menganalisis data.

3. Result and discussion

Pemilihan Legislatif Sebagai Bentuk Kontestasi

Dalam menjalankan pemerintahan yang berasaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar demokrasi, dengan tujuan untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang kelak mengisi jabatan-jabatan eksekutif baik ditingkat pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, yang disebut para penyelenggara negara (Rais dkk, 2019).

Secara Normatif, tujuan Pemilu adalah membentuk pemerintahan baru dan perwakilan rakyat yang benar-benar bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maksud dari Pemilu adalah agar wakil-wakil rakyat benar-benar dipilih oleh rakyat, berasal dari rakyat, dan akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Adapun asas-asas Pemilu adalah Pemilu secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sedangkan sikap perilaku penyelenggara Pemilu yaitu partai politik (Sendari, 2023).

Keberlangsungan Pemilihan Umum di Indonsia, sudah berlangsung 12 kali sejak tahun 1955-2019. Pada tahun 2019, pemilihan umum kembali diadakan untuk menentukan kandidat yang menjadi wakil rakyat yang duduk dalam kursi legislatif, baik legislatif di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, hingga pada tingkat nasional.

Pada tahun 2019, pemilihan legislatif yang ke-4 juga berlangsung di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada masa pemilihan ini, Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri 3 Daerah pilih yaitu: Daerah Pilih 1 yang terdiri dari kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Pollung, Kecamatan, Sijamapolang, Kecamatan Baktiraja dan Kecamatan Onanganjang. Daerah pilih 2 yang terdiri dari Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan. Serta daerah pilih 3

yang terdiri dari Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Tarabintang.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan 2019, terdapat sejumlah kandidat dari beberapa partai yang ikut berkontestasi pada setiap daerah pilih. Adapun jumlah kandidat dari daerah pilih 1 yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa (10 orang Kandidat), Partai Gerakan Indonesia Raya (12 orang kandidat), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (12 orang kandidat), Partai Golongan Karya (12 orang kandidat), Partai Nasdem (6 Orang Kandidat), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (4 orang kandidat), Partai Keadilan Sejahtera (2 Orang Kandidat), Partai Persatuan Indonesia (11 orang Kandidat), Partai Solidaritas Indonesia (12 orang kandidat), Partai Amanat Nasional (6 orang kandidat), Partai Hati Nurani Rakyat (12 orang kandidat), Partai Demokrat (11 orang kandidat), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (3 orang kandidat). Adapun jumlah kandidat dari daerah pilih 2 yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa (6 orang kandidat), Partai Gerakan Indonesia Raya (6 orang kandidat), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (6 orang Kandidat), Partai Golongan Karya (6 orang Kandidat), Partai Nasdem (6 orang Kandidat) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (2 orang kandidat), Partai Persatuan Indonesia (6 orang kandidat), Partai Solidaritas Indonesia (2 orang kandidat), Partai Hati Nurani Rakyat (6 orang kandidat), Partai Demokrat (4 orang kandidat), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (3 orang kandidat). Serta jumlah kandidat dari daerah pilih 3 yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa (6 orang kandidat), Partai Gerakan Indonesia Raya (7 orang kandidat), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (7 orang kandidat), Partai Golongan Karya (7 orang kandidat), Partai Nasdem (5 orang kandidat), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (6 orang kandidat), Partai Keadilan Sejahtera (3 orang kandidat), Partai Persatuan Indonesia (7 orang kandidat), Partai Solidaritas Indonesia (4 orang kandidat), Partai Amanat Nasional (2 orang kandidat), Partai Hati Nurani Rakyat (7 orang kandidat), Partai Demokrat (1 orang kandidat), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (3 orang kandidat). Adapun total kandidat calon legislatif periode 2019-2024 sebanyak 231 orang kandidat untuk memperebutkan 25 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Setiap kandidat calon legislatif 2019 yang berkompetisi tentunya berharap bisa menang. Namun untuk memperoleh kemenangan tentunya harus bisa mengalahkan saingannya. Adapun bentuk persaingan dalam pemilihan legislatif dapat dibagi kedalam 3 kelompok yaitu:

1. Persaingan sesama marga. Persaingan ini merupakan sebuah persaingan yang terjadi ketika dalam pemilihan tersebut terdapat lebih dari 1 orang calon yang berasal dari marga yang sama. Berdasarkan pengalaman bapak Labuan Sihombing pada pemilu 2019-2024 di Daerah Pilih 2 (Kecamatan Lintongihuta dan Kecamatan Paranginan), terdapat 6 calon Legislatif dari satu marga yaitu Marga Sihombing. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Labuan Sihombing pada 12 Januari 2024, beliau menyampaikan bahwa:

"Waktu itu ada 6 kalo ngak salah ada dari Nasdem pak torkis Sihombing dan pak ade slamat sihombing, saya Labuan sihombing, Tumpak Sihombing, Gamson Sihombing, dan Bukka Sihombing".

Kondisi ini membuat suara dari marga Sihombing yang menghuni dapil 2 Lintongnihuta-Paranginan terbagi-bagi. Hal ini tentunya, membuat persaingan dalam menarik simpati *marga* Sihombing semakin kompetitif. Setiap masyarakat yang memiliki marga Sihombing sangat berharap kerabatnya bisa menang, akan tetapi jumlah populasi dari *marga* sihombing tidak cukup untuk memenangkan keenam kandidat tersebut.

2. persaingan *se-toga/ parsadaan marga-marga* (persatuan marga-marga). *Toga* atau persatuan marga-marga merupakan persatuan dari marga-marga yang ditarik dari induk marga tersebut. Hal ini mengakibatkan setiap marga yang tergabung dalam *toga* tersebut dianggap bersaudara. Namun tidak bisa dipungkiri, walaupun setiap marga yang tergabung dalam sebuah *toga* dianggap bersaudara, persaingan dalam internal *toga* dalam pemilihan legislatif juga memanas. Berdasarkan hasil wawancara dengan kandidat calon legislatif 2019-2024 lainnya yaitu bapak K.T Sianturi pada 11 Februari 2024 beliau menyebutkan bahwa:

"Tahun 2019 ada tapi memang dari sini juga. Kalo daerah paranginan ini kan dikenal dengan Toga simatupang. Ada beberapa marga didalamnya yaitu Sianturi, Siburian dan Togatorop. Nahh waktu itu ada boru siburian dan saya dari sianturi".

Berdasarkan uraian tersebut tidak bisa dipungkiri persaudaraan dalam kumpulan marga-marga (*toga*) tetap menjadi penyumbang kompetitor bagi setiap kandidat.

3. Persaingan antar *marga*. Persaingan ini merupakan persaingan antara *marga* yang satu dengan marga lain yang tidak memiliki hubungan persatuan *marga*. Hal ini umum dilakukan oleh setiap kandidat sebagai upaya dalam menjaga harga diri *marganya* sendiri.

Berdasarkan bentuk-bentuk persaingan tersebut, setiap kandidat calon legislatif tentunya harus bersiap dalam segala jenis persaingan, sebab dalam kontestasi pemilihan legislatif, tidak mengenal istilah saudara, melainkan hanya mengenal kompetitor.

Sistem Keekerabatan Sebagai Strategi Politik

Mayoritas penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan Suku Batak. Suku Batak yang terkenal dengan sistem kekerabatan patriarki. Hal ini ditandai dengan melekatnya nama akhir (*marga*) yang spontan ditarik dari ayah. Marga ini menjadi identitas utama bagi masyarakat suku Batak dalam *martutur* (bersilsilah).

Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan yang mayoritas suku Batak juga menerapkan *dalihan natolu* sebagai falsafah hidup. Dalihan natolu memiliki kada dasar yaitu *dalihan* (tungku), *natolu* (tiga atau memiliki 3) berdasarkan kata dasar tersebut dalihan natolu dapat diartikan sebagai tungku yang berkaki 3. Hubungan ketiga kaki tungku tersebut menjadi pondasi utama berdirinya

tungku tersebut. Filosofi yang terdapat pada dalihan natolu tersebut melahirkan sebuah 3 pedoman bagi Suku Batak yaitu:

1. *Somba Marhula-hula* (hormat, taat, atau sembah kepada pihak *hula-hula*).
2. *Manat mardongan tubu* (sikap waspada, sikap hati-hati kepada pihak *dongan tubu*).
3. *Elek marboru* (sikap membujuk kepada pihak *boru*).

Berdasarkan falsafah *dalihan natolu* ada 3 kategori kekerabatan bagi Suku Batak yaitu: *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*.

Adapun yang dimaksud dengan kategori tersebut yaitu:

1. *Hula-hula* yaitu: orangtua dari istri (*simatua*) beserta dengan kerabat satu marganya. Saudara laki-laki istri (*lae*) beserta dengan kerabat semarganya. Saudara laki-laki ibu (*tulang*) beserta dengan kerabat satu marganya.
2. *Dongan tubu* yaitu kerabat yang memiliki marga yang sama (*samarga*).
3. *Boru* yaitu: anak perempuan (*boru*) dan suaminya (*hela*), beserta dengan seluruh kerabat semarga dengan suaminya. Saudara perempuan (*iboto*) dan suaminya (*lae*), beserta dengan seluruh kerabat semarga dengan suaminya. Saudara perempuan ayah (*namboru*) dan suaminya (*amangboru*) beserta dengan seluruh kerabat semarga dengan suaminya.

Sistem kekerabatan ini menjadi acuan solidaritas persaudaraan bagi Suku Batak yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Solidaritas tersebut pada umumnya diprioritaskan untuk *horong dongan tubu* (kerabat semarga). Sebab *dongan tubu* merupakan saudara yang tidak bisa dipisahkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan bahwa peranan dari kerabat khususnya *horong dongan tubu* sangat membantu bagi seseorang kandidat calon legislatif dalam melakukan berbagai kegiatannya, mulai dari kampanye, sosialisasi strategi hingga bantuan dukungan di hari pencoblosan.

Namun, pada dasarnya *horong dongan tubu* tentunya tidak cukup untuk mengunci kemenangan calon kandidat. Sehingga dibutuhkan juga partisipasi kerabat lainnya yang berasal dari *horong hula-hula* dan *horong boru* atau sering juga disebut dengan istilah "*paradatan*". *Paradatan* merupakan kumpulan dari kerabat yang berasal dari *horong hula-hula*, *dongan tubu* dan *boru* ditambah dengan *dongan sahuta* (sekampung). Namun, dalam membantu kandidat calon legislatif melakukan pendekatan, tentunya *horong dongan tubu* menjadi perantara yang dianggap massif untuk mengadakan pendekatan.

Kekuatan kerabat mulai dari *horong hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru* akan menghasilkan potensi suara menang. Sehingga para kandidat melakukan upaya pendekatan untuk menjaga simpati kerabatnya. Pendekatan yang dilakukan beragam, mulai dari sosialisasi, menjumpai door to door hingga pemberian *sipalas roha* (cendera mata) kepada kerabatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kandidat calon legislatif 2019-2024 yaitu bapak Labuan Sihombing pada 12 Januari 2024, beliau menjelaskan bahwa:

"Ada yang mengusulkan supaya dibuat satu kesepakatan atau dibuat suatu pertemuan di dusun atau di desa yahh kita sah-sah aja menerima waktu itu, jadi dibuatlah

pertemuan waktu itu perdusun. Waktu itu dibuat disatu rumah lah kita sampaikan niat kita, kita yakinkan mereka”.

Disamping bersosialisasi pak Labuan Sihombing juga memberikan sipalas roha untuk meyakinkan kerabatnya dalam pencalonannya sebagai calon Legislatif periode 2019-2024. Berdasarkan hasil wawancara dengan kandidat calon legislatif 2019-2024 yaitu bapak Labuan Sihombing pada 12 Januari 2024, beliau menjelaskan bahwa:

“Tidak ada yang spesifik uang begitu cuman ada berupa cendra mata, dan juga bentuk kearifan lokal. Apa itu kearifan loka misalnya “marbinda”. Kalo disinikan dikampung yang kita cintai ini masih dari dulu ada marbinda kalo dalam artian umum memotong seekor ternak, baik itu babi, kerbau. Jadi kita lihat ada kesepakatan untuk hal tersebut. Kadang disatu tempat itu ada juga yang bisa satu sama lain untuk ketemu. Karena saya jujur aja ngak punya duit. Tapi bagaimanapun tetap saya hargai. Bisa berkumpul dengan keluarga makan bersama, berdoa bersama untuk mendoakan saya. Mereka setuju. Dipotonglah waktu itu beberapa ternak babi, lalu dibagi-bagikan. Ya inilah ada yang bertanya darimana ini. dari si Labuan, kadang juga ada pertanyaan ini untuk caleg katanya. Iya biar kita doakan seperti itu yang kita buat kemarin”.

Hal yang berbeda dilakukan oleh K.T sianturi. Untuk melakukan pendekatannya, beliau melakukan pendekatan *door to door*. Berdasarkan hasil wawancara dengan kandidat calon legislatif 2019-2024 lainnya yaitu bapak K.T Sianturi pada 11 Februari 2024 beliau menyebutkan bahwa:

“Strateginya tidak lain tidak bukan yahh mendekati masyarakat pemilih. Kita sosialisasi program-program kedepan. Ada juga dibumbui kedekatan secara kekeluargaan namun. Yahh ada keluarga itu ada hula-hula ada yang namanya boru itu sudah pasti. Tapi strateginya harus door to door kepada masyarakat jangan juga memaksakan misalnya saya marga sianturi harus semua marga sianturi mendukung saya. Tidak, artinya pendekatannya, bagaimana kita menjual program kedepannya. Ada juga ikatan dalihan natolu tadi”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan bahwa kerabat dari horong *dongan tubu*, belum mampu untuk mengunci kemenangan seorang kandidat calon legislatif, sehingga membutuhkan partisipasi dari kerabat lainnya yaitu *hula-hula* dan *boru*. Untuk mendapatkan simpati dari mereka, kandidat calon legislatif memberikan ruang pendekatan baik secara personal yaitu dengan cara *door to door* maupun memberikan ruang pendekatan secara publik, baik dengan cara memberikan cendera mata maupun hadiah yang bisa menarik simpati dari kerabatnya.

Cara maupun strategi ini sangat efisien, hal ini dibuktikan dengan kemenagan dari kedua calon Legislatif Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2019-2024 yaitu Bapak Labuan Sihombing dan Bapak K.T Sianturi. Meskipun cara dan strategi pendekatan kedua calon ini berbeda, namun basis yang menjadi target mereka adalah kerabat mereka baik yang berasal dari *horong dongan tubu*, *horong hula-hula* serta *horong boru*.

Berdasarkan keputusan KPU pada tahun 2019, Bapak Labuan Sihombing memperoleh jumlah suara sebanyak 3.022 suara dan bapak K.T Sianturi memperoleh suara sebanyak 2.716 suara. Hal ini menjadikan mereka berdua sah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2019-2024.

Dalihan natolu sebagai falsafah untuk mengatur alur kekerabatan membuat kekerabatan bagi Suku Batak menjadi sangat Kompleks. Kekerabatan bukan hanya sebatas hubungan sedarah dan hubungan perkawinan saja, melainkan hubungan dengan kerabat jauh yang berasal dari *horong hula-hula*, *horong dongan tubu* hingga *horong boru*.

Dalihan natolu sebagai falsafah hidup, kerap juga diterapkan dalam memperagakan praktik politik berbasis kerabat. Namun, tidak bisa dipungkiri praktik politik ini tentunya memberikan konsekuensi budaya maupun sosial yang dialami oleh masyarakat yang terlibat di dalamnya

1. Terjadinya Pecah Kongsi dalam Internal Marga

Hubungan jaringan kekerabatan yang sangat kompleks, tentunya membuat dilematiknya seseorang dalam menentukan pilihannya. Tidak bisa dipungkiri, ada lebih dari 1 kandidat calon legislatif yang merupakan kerabat dari masyarakat, baik kekerabatan dari *horong hula-hula*, *dongan tubu* maupun *horong boru*. Padahal setiap masyarakat hanya memiliki 1 suara. Fenomena ini dirasakan oleh kandidat calon legislatif. sebab tidak seutuhnya *dongan tubu* untuk mendukungnya sebagai calon legislatif.

Disamping sistem kekerabatan yang kompleks, tantangan dari setiap kandidat bisa berasal dari dalam internal marganya sendiri maupun *setoganya* sendiri (persatuan marga-marga). Persaingan antar sesama *marga* dan persaingan *setoga* (persatuan marga-marga) memberikan gambaran adanya pecah kongsi dalam internal marga maupun internal *toga* dalam mencalonkan kandidat legislatif. Tentunya keadaan ini berimbas pada rasa solidaritas yang tidak lagi utuh dalam internal *marga* maupun internal *toga* dalam pemilihan calon legislatif.

2. Adanya Perlakuan Spesial Kepada Kerabat Pendukung

Adapun konsekuensi yang bernilai positif itu dirasakan oleh kerabat *dongan tubu* yang kandidat calon legislatif memenangkan kontestasi pemilihan calon legislatif 2019-2024. Munculnya rasa solidaritas yang menjadi kuat, disertai dengan adanya pemberian khusus yang diberikan oleh caleg yang terpilih kepada kerabat *horong dongan tubu* yang mendukungnya.

3. Rasa Fanatisme yang berujung pada gesekan sosial

Disamping konsekuensi yang bernilai positif, praktik politik berbasis kerabat juga memiliki konsekuensi yang bernilai negatif. yaitu gesekan-gesekan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Dalam pemilihan legislatif, kompetisi dalam meraih suara sebanyak-banyaknya tentu akan diupayakan oleh setiap kandidat, untuk mengamankan kemenangannya. Ketatnya persaingan dalam mendulang massa untuk memenangkan kontestasi tentunya berakibat adanya gesekan dalam masyarakat.

Gesekan tersebut pada umumnya berlaku untuk kalangan masyarakatnya sedangkan untuk kalangan kandidat calon legislatif, mereka selalu mengupayakan untuk akur.

4. Adanya Intimidasi Bagi Masyarakat yang Tidak Sehaluan Dalam Memenangkan Kerabatnya.

Praktik politik berbasis kerabat juga memiliki konsekuensi negatif yang berat. Hal ini terjadi ketika seseorang tidak memilih kerabatnya dan memilih orang lain, padahal kerabatnya tersebut memenangkan kontestasi pemilihan. Sehingga timbul intimidasi baik dari kandidat caleg tersebut maupun dari kerabatnya yang lain.

4. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian Praktik Politik Berbasis Kerabat Di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat disimpulkan bahwa; Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan mayoritas Suku Batak yang masih mengindahkan falsafah *dalihan na tolu*. Falsafah ini mengatur bentuk penghargaan kepada kerabatnya baik dari *horong hula-hula*, *horong dongan tubu*, maupun *horong boru*. Praktik Politik berbasis kerabat di Kabupaten Humbang Hasundutan masih berlaku. Hal ini disebabkan karena adanya sebuah kebanggaan dalam diri setiap individu ketika kerabatnya terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Hubungan Kekerabatan bagi Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan yang sangat kompleks, terkadang menjadi boomerang bagi Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menentukan pilihannya. Hal ini terjadi, apabila adanya calon legislatif dari kerabatnya yang berasal dari *horong hula-hula*, *horong dongan tubu* maupun *horong boru* yang mencalonkan diri secara bersamaan. Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan memilih calon kandidat legislatif dengan memilihat silsilah terdekat dari dirinya.

Praktik politik berbasis kerabat memberikan konsekuensi yang bernilai positif dan bernilai negatif bagi masyarakat. Pada umumnya konsekuensi ini paling rentan dialami oleh kerabat *dongan tubu* dari calon kandidat tersebut. Konsekuensi yang bernilai positif terjadi apabila, kerabat yang didukung memenangkan pemilihan sehingga kerabat *dongan tubu* dari caleg tersebut mendapatkan posisi strategis untuk membantu menjalankan kegiatan-kegiatannya. Selain itu, anggota DPRD terpilih juga akan memprioritaskan segala acara atau kegiatan adat dari kerabat *dongan tubu* yang mendukungnya. Konsekuensi yang bernilai negatif terjadi ketika adanya sebuah masalah dalam masyarakat. Konsekuensi yang bernilai negatif ada yang ringan seperti gesekan akibat adanya fanatisme yang mengkotak-kotakkan masyarakat. Selain itu, Konsekuensi yang bernilai negatif ada dalam kasus berat, hal ini terjadi ketika adanya oknum DPRD yang mengintimidasi kerabatnya yang tidak mendukungnya. Tokoh adat memiliki otoritas dalam menjaga keharmonisan internal kerabatnya, sehingga ketika adanya permasalahan yang berpotensi memecah persaudaraan mereka. Tokoh adat bertugas untuk mendamaikan

pihak yang bermasalah, baik karena masalah adat, masalah sosial maupun masalah politik.

Referensi

- Ashmarita, Cindy, & Sumule, G. M. 2022. Orang Batak Mempertahankan Identitas Etnisnya. *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)*, 43-46.
- Daulay, M., S. Kusmanto, H. & Khadir A. 2019. Politik Identitas pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik*. 9(1): 49-56.
- Dwitasari, P., Darmawati, O., N., Noordyanto, N., Sittasya, A., V., Zulraniyah, W., Raihanah, D., F., & Karim, A., A. 2020. Penggunaan Metode Observasi Partisipan untuk Mengidentifikasi Permasalahan Operasional Suroboyo Bus Rute Merr-ITS. *Jurnal Desain*, 19(2): 53-57.
- Firmando, B., H. 2021. Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Kawasan Danau Toba. *Aceh Anthropological Journal*, 5(1): 16-36.
- Haloho, N. 2017. Jaringan Marga sebagai Mesin Politik Pemenangan Bupati Terpilih Periode 2015-2020. *Journal Politics and Government studies*, 6(4): 151-160.
- Mawara, T., E., J. 2015. Solidaritas Kekerabatan Suku Bangsa Bantik Di Kelurahan Malalayang I Manado. *e-journal acta Diurna*, 4(2): 1-13
- Nasrudin, J. 2018. Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Jurnal Studi Agama-Agama* 1(1): 34-47.
- Pamungkas, P., C. 2018. Politik Kekerabatan dalam Pemilu: Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini, S.E- Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten 2015. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(3): 221-230.
- Pramesti, U., P., Prabowo, N., B., & Hasan, I., M. 2019. Kajian Ruang Dan Aktivitas Pasar Minggu Taman Setiabudi Banyumanik Terhadap Terbentuknya Kohesi Sosial Masyarakat. *Jurnal MODUL*, 19(2): 110-118.
- Purwaningsih, T. 2022. Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1): 1-28.
- Purwaningsih, T. 2022. Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*. 1(1): 1-28.
- Rahmat, N., F. & Simangunsong, A., B. 2021. Makna Kekerabatan Dalam Budaya Lonto Leok Pada Proses Pilkada di Manggarai Barat. *Jurnal Lontar*, 9(1): 9-19.
- Rais, S., M., A., Wahidin, S., Nurita, F., R., & Rifandhana, F., R. 2019. Analisis Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019. *Bhirawa Law Journal*. 2 (2): 136-144.
- Ruseni, T., Y. 2020. Antropologi Politik Helmuth Plessner. *JAP UNWIRA*, 1(1): 20-34

- Sahputri, J., Agustono, B., & Zuska, F. 2021. Budaya dan Sistem Kekeluargaan Etnis Aneuk Jamee: Studi Kasus di Aceh Selatan. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8(2) : 110-126.
- Saleh, K., & Munif, A. 2015. Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi. *ADDIN* 9(2): 309-332.
- Siagian, M.,A. & Permatasari, Y. 2022. Insecurisme Politik Rakyat Indonesia Pada Pemilihan Kepala daerah 2020. *Jurnal Populika*, 10(1): 10-23.
- Sihombing, R.,M.,M. .2020. Sistem Kekerabatan Suku Batak Toba. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 13(1): 106-113.
- Silalahi, N.,J. 2020. Politik Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Kisaran Naga (Studi Kasus Pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2019) *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 8(2) : 115-124.
- Sitompul, R.,D. 2022. Fungsi Kekerabatan Kelompok Marga Dalam Integrasi Sosial Pada Masyarakat Di Dusun Jumamangkat Desa Pegagan Julu X Kabupaten Dairi. *Jurnal Budaya Etnika*. 6(1): 19-28.
- Sumatri Ms, I. 2021. Politik Kekerabatan Limpo di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 1(1), 51-66.
- Upe, A., Nur, M. J. ., & Suaib, E. 2022. Kontestasi Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa: Konteks Masyarakat Bugis. *Indonesian Annual Conference Series*, (Proceedings of IACS-CSPC 2022), 104-108.
- Windisari, Y., & Wahyuliana. 2022. Tahta Extended Family Dalam Bias Politik Kekerabatan. *Jurnal Pamator*, 15(1): 53-65.